

**PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KOTA
SEMARANG (STUDI KASUS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA SEMARANG DI BIDANG PERINDUSTRIAN)**

Oleh:

Intan Andriani, Dra. Nina Widowati, M.Si

**Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Professor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman :
<http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.com

Abstract

Small and Medium Industries plays an important role for the economy of the Semarang city. This sector is able to address equity in the distribution of income among regions. If the Small and Medium Industries can be maximized, the city of Semarang can raise the local revenue. This study aimed to describe and analyze the performance of industrial field in Semarang, also drives the performance of Industry Department and Trade in Semarang to implementing the Development Program of Small and Medium Industries. This study uses qualitative research with descriptive methodes. The results shows that performance in implementing the Programme for Small and Medium Industry Development has not been maximized. This assessment is based on the dimensions of productivity, quality of service, responsiveness, and accountability and reponsibility. This could be happen because the Industry can not achieve 100% of the target achievement and there has been no significant increase in the number of Small and Medium Industries. Incentives can be seen from the aspect of performance factors for Human Resources and Cultural Organization. The conclusion of this study is the performance of Department of Industry and Trade in Semarang is not yet up and need to be scaled back. Suggested for Industry increasing the quantity and quality of human resources and imposed a system of reward and punishment.

Keywords: Human Resources, Organizational Culture, Small and Medium Industries

PENDAHULUAN

Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang “Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” diharapkan Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi barang dan jasa dapat diwujudkan. Didalam pembangunan sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri dan perdagangan di Kota Semarang dengan mengutamakan industri/usaha kecil menengah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, di era perdagangan bebas dunia produk nasional selain harus mempunyai keunggulan komperatif juga harus mempunyai keunggulan komperatif dan lebih berdaya saing. Produk-produk itu dari waktu ke waktu harus berkualitas, inovatif dan tanpa henti-hentinya bervariasi, berkombinasi, diversifikasi sesuai dengan perkembangan dan permintaan pasar, supaya dapat bersaing di pasar dunia, maka pemerintah perlu mengubah dengan pengembangan dan memperhatikan serta memberikan fasilitas kepada sektor industri dan perdagangan yang mempunyai potensi unggulan, pasar luas dan mampu bersaing di pasar internasional.

Kota Semarang sebagai salah satu Kota Industri besar di Jawa Tengah haruslah memperhatikan hal tersebut. Dinas yang mengemban tugas ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, guna memenuhi masyarakat akan kebutuhan tersebut perlu adanya peran yang besar dari Pemerintah Kota Semarang. Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kota Semarang mempunyai 2 (dua) urusan yaitu urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Di dalam urusan perdagangan kegiatan diarahkan untuk mendukung kegiatan pasar, distribusi dan perlindungan konsumen, sedangkan untuk urusan perindustrian kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang perindustrian serta meningkatkan Industri Kecil dan Menengah. Kondisi industri dan

perdagangan Kota Semarang perlu terus menerus ditumbuhkembangkan agar dapat terwujud kemandirian dan daya saing daerah yang pada gilirannya visi kota Semarang dapat terwujud.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang memiliki fungsi untuk menumbuhkembangkan industri yang mampu bersaing di pasar untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan industri yang berwawasan lingkungan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang terdiri dari Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian, dan Bidang Teknologi Industri dan Perdagangan. Apabila kinerja salah satu bidang tidak optimal, tentu visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang akan sulit tercapai, untuk mempermudah fokus penelitian ini, maka peneliti memilih studi pengamatan di Bidang Perindustrian, dimana Bidang Perindustrian Kota Semarang menangani permasalahan di bidang Industri termasuk mengenai Industri Kecil dan Menengah. Permasalahan mengenai Industri Kecil dan Menengah di Kota Semarang telah menjadi salah satu isu strategis di dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang tahun 2016-2021 seperti, belum memadainya kualitas dan kapasitas SDM dan kelembagaan Industri Kecil dan Menengah, terbatasnya akses permodalan dan pasar Industri Kecil dan Menengah,, dan belum optimalnya hubungan kerjasama usaha antara Industri Kecil dan Menengah, dengan industri besar.

Industri Kecil dan Menengah atau IKM di dalam Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah Industri Kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil dan Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pada saat ini, struktur perekonomian daerah Kota Semarang yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Disisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal berupa IKM dan koperasi harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah. Selain itu permasalahan yang mengiringi adalah masalah kemiskinan dan pengangguran, di Kota Semarang sendiri terdapat 5,04% penduduk Kota Semarang yang terkategori miskin pada tahun 2015 (versi Pemkot Semarang).

Industri kecil dan Menengah memegang peranan penting bagi perekonomian Kota Semarang, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu Industri kecil dan Menengah terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan Industri kecil dan Menengah tidak mengandalkan barang impor. Industri kecil dan Menengah yang banyak menyerap tenaga kerja membuat sektor ini juga intensif dalam menggunakan sumberdaya lokal. Banyaknya jumlah orang yang bekerja pada Industri kecil dan Menengah memperlihatkan betapa pentingnya peranan Industri Kecil dan Menengah dalam membantu memecahkan masalah pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan. Jika Industri Kecil dan Menengah dapat dimaksimalkan dengan baik maka Kota Semarang telah siap bersaing dalam menghadapi pasar perindustrian dan perdagangan Masyarakat Ekonomi Asean nantinya.

Melalui pengamatan yang dilakukan peneliti di Disperindag Kota Semarang, dan melakukan beberapa tanya jawab dengan beberapa pegawai, peneliti mendapatkan beberapa faktor yang mendorong kinerja Disperindag Kota Semarang yaitu, sumber daya manusia dan budaya organisasi. Banyak aktivitas kerja pegawai di Disperindag Kota Semarang yang belum bisa memanfaatkan teknologi perangkat komputer. Pegawai masih banyak yang datang terlambat walaupun presensi sudah menggunakan *fingerprnting*, bahkan beberapa pegawai hanya datang untuk melakukan presensi kemudian ijin dengan berbagai alasan, kemudian juga banyak yang tidak melakukan pekerjaan dan hanya duduk-duduk mengobrol sambil main *handphone*. Pada penelitian ini penulis fokus terhadap bagaimana kinerja

organisasi pencapain visi dan misi organisasi pada bidang industri terutama pada program pengembangan Industri kecil dan Menengah dan faktor-faktor yang mendorong dari kinerja organisasi itu sendiri. Penulis berasumsi bahwa organisasi publik dalam menjalankan tugasnya masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam upaya pemenuhan kebutuhan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Desain ini dipilih karena peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan Kinerja Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang pada program pengembangan industri kecil dan menengah. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan dibatasi waktu serta pengumpulan informasi secara lengkap dengan prosedur pengumpulan data yang telah ditetapkan.

Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini adalah dengan menggunakan *key informan* sebagai subyek penelitian. Penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dan Kepala Bidang Perindustrian.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya (subjek penelitian) melalui wawancara yang mendalam, pengamatan langsung serta penelitian terlibat. Di dalam hal ini peneliti adalah informan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dan Kepala Bidang Perindustrian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk

data sekunder ini dapat berupa catatan-catatan hasil wawancara dengan para informan, buku-buku literatur yang sesuai untuk menganalisis kinerja organisasi, dokumen laporan kinerja Bidang Perindustrian Disperindag Kota Semarang, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.

1. Wawancara

Dalam buku Metode Penelitian kualitatif R&D karangan Sugiyono (2009:137) mendefinisikan wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dan Kepala Bidang Perindustrian.

2. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009:145) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data. Menurut cara pelaksanaannya kegiatan observasi dibagi atas dua bentuk yaitu, *observasi partisipatif* dan *observasi non partisipatif*. Di dalam observasi partisipatif, *observer* (pengamat) ikut ambil bagian dalam kegiatan objeknya sebagaimana yang lain dan tidak nampak perbedaan dalam bersikap. Jadi *observer* ikut aktif berpartisipasi pada aktivitas

dalam segala bentuk yang sedang diselidiki. Kemudian, di dalam observasi non partisipatif, *observer* tidak melibatkan diri ke dalam wilayah pengamatan, pengamatan dilakukan secara sepiantas pada saat tertentu kegiatan observernya. Di dalam hal ini peneliti melakukan *observasi non partisipatif*.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian seperti Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Tahun 2016-2021, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Tahun 2016, foto-foto terkait penelitian, catatan hasil wawancara dengan para informan yang terkait.

Pada Penelitian ini peneliti akan menggunakan seluruh teknik pengumpulan data mulai dari wawancara, observasi non partisipatif, dan dokumen untuk melihat pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Sugiyono (2009:169-170), adalah mendeskripsikan, menjelaskan serta membuat estimasi. Nalisis data di dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu deskriptif, analisis eksplanatif, dan analisis inferensi.

Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam analisis data:

A. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

B. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Suatu penyajian sebagai sekumpulan Informatika tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebagai kumpulan informasi atau data yang telah tersusun dan terkumpul serta dianggap penting dan memberi keuntungan untuk mempermudah membantu merumuskan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat.

C. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelah sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Pada penelitian ini peneliti menggunakan simbol negatif (-) dan positif (+) untuk menentukan hasil dari kesimpulan wawancara, dimana untuk mengetahui kesimpulan akhir dari setiap informan.

Kualitas Data

Penelitian kualitatif harus memiliki standar kredibilitas yang baik. Standar kredibilitas ini untuk menunjukkan agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada dilapangan tentang kinerja Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan.

HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Bidang Perindustrian dalam Melaksanakan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Semarang

Bidang Perindustrian merupakan salah satu Bidang dalam struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab di Bidang Perindustrian dan berperan terhadap keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Bidang Perindustrian dalam melaksanakan program pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Semarang melalui lima dimensi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selain itu, mendeskripsikan pendorong kinerja Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dilihat dari sumber daya manusia dan Budaya organisasi.

4.1.1 Produktivitas

Produktivitas Bidang Perindustrian dalam penelitian ini dilihat dari kesesuaian program kegiatan yang dijalankan Bidang Perindustrian dengan target dan sasaran,

kendala Bidang Perindustrian dalam menjalankan Program pengembangan industri kecil dan menengah, dan solusi yang telah dilakukan Bidang perindustrian dalam menghadapi kendala tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa program dan kegiatan yang dijalankan Bidang Perindustrian belum sesuai target dan sasaran, berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 capaian realisasinya cukup sangatlah rendah terutama pada kegiatan pembinaan, hal ini menunjukkan bahwa produktivitas Bidang Perindustrian belum maksimal karena belum bisa memenuhi target dan capaian tersebut secara realita belum mengalami peningkatan yang signifikan. Kenyataan yang didapatkan di lapangan memang Bidang Perindustrian ternyata belum bisa melakukan perencanaan dengan baik mengenai program pengembangan IKM. Para pemilik IKM non resmi yang telah mendapatkan pelatihan menjahit pada tahun 2015 mengatakan bahwa tidak adanya monitoring kembali setelah adanya pelatihan. Disisi lain Bidang Perindustrian saat ditanya mengenai jumlah Industri Kecil dan Menengah mereka tidak memiliki data yang pasti karena memang susah untuk melakukan pendataan dengan jumlah SDM yang terbatas. Data jumlah IKM bisa didapatkan jika Bidang perindustrian melakukan monitoring dari setiap kegiatan yang mereka lakukan sehingga jika Bidang Perindustrian sendiri tidak melakukan monitoring ataupun peninjauan kembali mereka tidak akan mengetahui jumlah IKM bertambah atau tidak, karena banyak ditemukan industri yang termasuk dalam Industri Kecil dan Menengah di Kota Semarang namun tidak terdaftar di Disperindag Kota Semarang.

Kendala yang dihadapi Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dalam menjalankan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah adalah keterbatasannya anggaran sehingga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan

masyarakat guna memberikan pembinaan lebih maksimal. SDM yang terbatas dengan banyaknya permintaan pelatihan dari setiap daerah sehingga tidak dapat terpenuhi dan tidak bisa melakukan peninjauan kembali setelah dilakukan pelatihan sehingga tidak ada data yang pasti apakah pelatihan di daerah tersebut berhasil atau tidak. Data yang didapatkan Disperindag Kota Semarang dari daerah sudah tidak *update* mengenai jumlah IKM dikarenakan tidak ada sumberdaya untuk melakukan pendataan dilapangan, padahal Disperindag sudah melakukan kerjasama salah satunya adalah dengan Dinas Koperasi. Dinas Koperasi selain dapat memberikan modal kepada masyarakat yang ingin membuat usaha industri namun juga mempunyai program yang bernama IUMK atau Ijin Usah Mikro Kecil yang dimana masyarakat para pemilik Industri Kecil bisa dengan mudah mendaftarkan usahanya melalui Kecamatan untuk bisa dinyatakan sebagai IKM resmi. Melalui IUMK tersebut nantinya Bidang Perindustrian bisa tahu jumlah IKM disetiap Kecamatan tanpa harus melakukan pendataan langsung dilapangan. Kenyataannya di lapangan ketika peneliti melakukan wawancara ke beberapa pemilik Industri Kecil di Kelurahan Ngesrep mereka sama sekali tidak tahu bahwa ada program IUMK tersebut. Jadi kendala bukan hanya terhadap kinerja dari Bidang Perindustrian yang kekurangan SDM maupun anggaran namun mereka juga kurang dalam mempromosikan program tersebut bersama dengan Dinas Koperasi. Bidang Perindustrian sendiri juga menyatakan bahwa para pegawai yang menjalankan program IUMK tidak menyetorkan jumlah IKM dalam kurun waktu tertentu. hal tersebut juga menunjukkan komunikasi diantara kedua Dinas tersebut tidak berjalan dengan baik.

Sedangkan, solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah yakni melakukan kerjasama dengan instansi lain baik dengan SKPD yang terkait ataupun dengan pihak swasta lainnya. Kemudian, dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa pihak lain mempunyai andil dalam mengembangkan usaha mereka. Solusi dari masalah produktivitas sebenarnya tidak hanya dengan menambahkan anggaran dan SDM saja namun kembali lagi kepada Bidang Perindustrian sendiri, jika Bidang Perindustrian bisa lebih kreatif dan efektif efisien dalam memanfaatkan semua keterbatasan yang ada maka produktivitas didalamnya akan meningkat dengan sendirinya. Data jumlah IKM yang diperoleh dari setiap Kecamatan melalui program IUMK dari Dinas Koperasi harus lebih ditingkatkan kembali dan segera menemukan masalah dari program tersebut kenapa program tersebut tidak bisa menyetorkan jumlah IKM yang terdaftar setiap bulannya. Harus terjalinnya komunikasi yang baik antara Bidang Perindustrian dengan pegawai program IUMK tersebut.

4.1.2 Kualitas Layanan

Pelayanan yang diberikan oleh Bidang Perindustrian adalah memberikan fasilitasi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya dengan melakukan pendampingan usaha dan melakukan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri dengan memberikan pelatihan-pelatihan setiap tahunnya diberbagai kecamatan. Seperti pada fasilitasi Bidang Perindustrian melakukan workshop manajemen produksi kepada masyarakat dan pada pembinaan guna memperkuat jaringan kluster tahun 2016 Bidang perindustrian melakukan 6 pelatihan di berbagai daerah yang berbeda, namun berdasarkan hasil wawancara di lapangan tidak adanya monitoring setelah dilakukannya pelatihan maupun fasilitasi tidak seperti yang dikatakan oleh Pegawai

Bidang Perindustrian. Bentuk pelayanan dari Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebenarnya tidak berbeda jauh keduanya, karena sama-sama memberikan pelatihan-pelatihan namun yang satu dari segi *hardskill* dan *softskill*. Pada pemberian fasilitasi dikatakan *softskill* karena Bidang Perindustrian memberikan workshop materi mengenai Manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen teknologi dari fasilitasi tersebut diharapkan masyarakat yang awalnya masih ragu dalam membuat Industri Kecil akan tertarik karena mereka sudah mempunyai ilmu dasar dalam hal produksi maupun pemasaran, bagi para pemilik IKM diharapkan usaha yang mereka miliki dapat lebih berkembang dari yang sebelumnya jadi selain kuantitas yang bertambah namun kualitas dari apa yang membuat menjadi lebih baik lagi sehingga omset atau pendapatan dari para pemilik IKM tersebut jadi lebih meningkat dan tentu saja perekonomian Kota Semarang akan semakin meningkat. Kegiatan pembinaan juga tidak kalah penting dengan kegiatan fasilitasi meski dibidang kegiatan masih sangat susah dalam mencapai keberhasilan karena setidaknya membutuhkan waktu 1 (satu) tahun hingga hasilnya keliatan. Peneliti juga melakukan wawancara dilapangan dengan para peserta pelatihan menjahit di Kelurahan Ngesrep tahun 2015 mereka merasa senang dengan pelatihan yang diberikan, misalnya dengan Bu Tuminah awalnya Bu Tuminah hanya ibu rumah tangga biasa yang bisa menjahit. Namun, setelah adanya pelatihan dari Bidang Perindustrian Bu Tuminah jadi berani untuk membuka usaha sendiri di rumahnya. Bu Tuminah merasa bahwa pelatihan tersebut sangat bagus dan beliau ingin kembali mendapatkan pelatihan namun dengan tema yang berbeda misalnya dari pelatihan pola dasar jahit menjadi pelatihan membordir. Bu Tuminah pun mengatakan bahwa dulu ia didaftarkan oleh Pak RT karena Pak RT tahu ia suka menjahit, jika saja Pak RT tidak mendaftarkan Bu Tuminah maka Bu

Tuminah tidak akan tahu bahwa Bidang Perindustrian akan melakukan pelatihan menjahit di Kelurahan Ngesrep. Setelah dilakukan wawancara lebih mendalam informasi mengenai pelatihan hanya didapatkan di Kelurahan bukan langsung ke masyarakat, sehingga ketika pelatihan yang banyak menjadi peserta adalah para pegawai kelurahan padahal jumlah peserta terbatas hanya sekitar 30 orang perpelatihan. Telisik lebih jauh ketika pelatihan para peserta akan mendapatkan makan siang dan juga uang saku selama 5 (lima) hari kedepan. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi bukan hanya dari Bidang Perindustrian sendiri dalam memberikan pelayanan namun juga Kelurahan yang tidak memberikan informasi secara penuh kepada setiap masyarakat. Masyarakatpun banyak yang tidak tahu bagaimana cara menyampaikan aspirasi mereka secara langsung maupun tidak langsung karena tidak adanya monitoring yang dilakukan kepada wilayah yang mendapatkan pelatihan. Padahal masyarakat merasa puas dengan pelatihan yang diberikan contohnya saja Bu Tuminah dan Bu Wanidi yang sekarang bisa membuka usaha kecil-kecilan di Bidang Menjahit berbekal dari pelatihan yang diberikan Bidang Perindustrian pada tahun 2015 lalu, namun perlu adanya peninjauan kembali karena dari Bu Tuminah dan Bu Wanidi sendiri kita bisa mendapatkan data 2 (dua) orang yang memiliki IKM namun belum terdaftar secara resmi karena mereka tidak mengetahui bagaimana caranya mendaftar.

4.1.3 Responsivitas

Kemampuan Bidang perindustrian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sudah cukup baik walaupun belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal-hal yang dilakukan Bidang Perindustrian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah melalui Musrembang desa kemudian *bottom up*

hingga ke Disperindag Kota Semarang khususnya Bidang Perindustrian. Selain melalui Musrebang melalui kegiatan-kegiatan didalam Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah seperti fasilitasi dan membina dari evaluasi kegiatan tersebut dapat juga diketahui kebutuhan masyarakat. Dan melalui masyarakat langsung selama monitoring dan pendampingan secara langsung di lapangan banyak mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Selain dari Musrebang Desa Bidang Perindustrian juga sebelumnya mempunyai data mengenai Wilayah Binaan. Wilayah Binaan merupakan Kecamatan Tematik yang memang sudah di klasifikasikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Kecamatan Tematik itu memiliki potensinya masing-masing, sehingga nantinya Bidang Perindustrian bisa mengembangkan Kecamatan tersebut dari segi kualitasnya, misalkan daerah ini memiliki potensi Bandeng Presto, fungsi dari Bidang Perindustrian adalah bagaimana membuat usaha bandeng presto tersebut lebih berkembang lagi baik dari segi pemasaran maupun teknologi yang digunakan. Biasanya setiap beberapa waktu Bidang Perindustrian melakukan survey ke Wilayah Binaan tersebut untuk mengetahui apa saja yang mereka butuhkan karena memang sudah dari awal wilayah tersebut lebih diperhatikan. Bidang Perindustrian seharusnya bukan hanya memperhatikan wilayah binaan saja namun juga daerah lainnya, karena banyak masyarakat yang ingin memberikan masukan pendapat dan ingin kebutuhannya didengar namun tidak tahu harus menyalurkannya kemana karena bidang tersebut tidak mempunyai pengaduan secara online maupun pegawai yang terjun langsung kelapangan. Melalui pelatihan-pelatihan seharusnya mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nantinya walaupun dengan SDM yang terbatas namun setidaknya selama 1 tahun kedepan setelah pelatihan mereka juga fokus ke wilayah yang mereka

berikan pelatihan karena bisa saja daerah tersebut menjadi wilayah binaan baru.

Bidang Perindustrian juga memiliki sikap yang baik dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. mereka menganggap keluhan dari masyarakat sebagai masukan yang positif, mereka juga menyikapi keluhan masyarakat dengan sikap yang terbuka, semua masukan masyarakat selalu mereka terima dengan baik sebagai perbaikan untuk pengembangan kinerja berikutnya, dalam menanggapi kebutuhan masyarakat mereka selalu senantiasa mencoba mengakomodir semampu mereka selama tidak melanggar aturan dan sesuai anggaran yang sudah ditetapkan, sedangkan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir, mereka menyelesaikannya dengan cara berkomunikasi secara baik-baik dengan masyarakat. Kenyataan di lapangan tidak adanya monitoring tidak adanya komunikasi, mungkin jika Bidang Perindustrian harus melakukan survey kesemua wilayah akan membutuhkan SDM dan anggaran yang banyak, namun jika mereka setidaknya fokus kedaerah yang berikan pelatihan itu jauh akan lebih mudah lagi. Mereka bisa saja bekerjasama dengan orang kelurahan untuk memonitoring apakah terdapat usaha baru setelah adanya pelatihan, namun dari hasil wawancara dengan Bu Yuyu pegawai kelurahan beliau mengatakn tidak ada yang menghubungi Kelurahan Ngesrep baik dari Disperindag Kota Semarang maupun Bidang Perindustrian pasca pelatihan diberikan dari tahun 2015 lalu.

4.1.4 Responsibilitas

Pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian sudah sesuai dengan kebutuhan karena sudah terprogram di dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan Renja, hanya saja terkait dengan kebutuhan ada kendala dalam hal kekurangan sumberdaya sehingga dalam melaksanakan tugas seperti menyelenggarakan suatu

kegiatan Perindustrian harus bekerjasama dengan Bidang lain dan pihak-pihak terkait yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan seperti dengan Dinas-Dinas terkait dan selain itu pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian juga sudah sesuai dengan kebijakan yang ada seperti UU, PP, Perwal, Perda, dan sesuai SOP. Pegawai Bidang Perindustrian memang sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, namun ketika peneliti melakukan magang di Disperindag Kota Semarang bagian perencanaan Bidang Perindustrian adalah bidang yang paling lama dalam menyerahkan dokumen yang diperlukan guna menyusun Renstra Tahun 2016-2021 padahal saat itu adalah bulan Desember 2016. Salah satu pegawai bagian perencanaan mengatakan bahwa Bidang perindustrian memang susah buktinya sampai sekarang mereka tidak mempunyai data mengenai jumlah IKM di Kota Semarang padahal itu adalah program dari mereka sendiri. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Bidang Perindustrian mereka mengatakan bahwa bidang lain memang suka menyalahkan Bidang Perindustrian, namun data IKM yang diserahkan kepada peneliti memang berupa buku berjudul Profil Sentral Industri Kota Semarang Tahun 2007. Dari hal tersebut peneliti jadi tahu bahwa memang data yang dimiliki sudah sangat lama karena sudah hampir 10 (sepuluh) Tahun lalu. Bisa dilihat juga terdapat sentimen antar pegawai didalamnya, peneliti beranggapan karena Bidang Perindustrian yang sering memberikan dokumen penting dengan telat sehingga menyusahakan dari bagian perencanaan tersebut dalam membuat suatu laporan pertanggungjawaban maupun perencanaan.

4.1.5 Akuntabilitas

Pertanggungjawaban. Kemudian terkait transparansi dan pelaporan hasil kinerja, Bidang Perindustrian juga sudah

transparan. bentuk transparansi yang dilakukan Bidang Perindustrian dalam melaksanakan program Pengembangan Industri kecil dan menengah sudah transparan. Akuntabilitas anggaran, dokumen perencanaan, dan laporan hasil kinerja selama ini sudah dimuat di Koran, website Bappeda Kota Semarang, dan website Pemerintah Kota Semarang, kemudian transparansi kegiatan-kegiatan yang diadakan Bidang Perindustrian sudah dimuat di Koran, Baliho, dan Spanduk. Bidang Perindustrian juga terbuka dalam memberikan informasi terkait hasil kerjanya kepada orang/kelompok yang berkepentingan. Selama ini peneliti sering memperhatikan retail sederhana dan melihat adanya *standing banner* yang bertuliskan Bidang Perdagangan Disperindag Kota Semarang, namun peneliti tidak pernah melihat adanya baliho maupun informasi-informasi mengenai IKM.

Ketika peneliti melakukan wawancara, salah satu cara Disperindag Kota Semarang untuk mengenalkan hasil industri dari Kota Semarang adalah melalui Gedung Dekranasda yang berada di jalan pemuda disana terdapat gedung yang berisikan hasil industri-industri dari Kota Semarang dengan cara memamerkan. Peneliti kemudian menanyakan kepada beberapa mahasiswa asli orang Semarang kebanyakan mereka mengetahui Gedung Dekranasda namun tidak tahu itu gedung apa dan fungsinya apa. Berarti dari segi transparansi program masih sangat kurang, selain itu Bidang Perindustrian tidak memiliki sosial media baik itu twitter maupun instagram. Jaman sekarang ini bukan hanya anak muda yang menggunakan sosial media namun juga para orang tua dan informasi lebih mudah didapatkan secara mudah di sosial media dibandingkan menggunakan baliho, spanduk dll. Melalui sosial media selain lebih murah tentu saja lebih efektif dan efisien dalam anggaran sehingga keterbatasan anggaran tidak akan menjadi

hambatan dalam memberikan informasi seputar IKM kepada masyarakat Kota Semarang.

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan program Pengembangan industri kecil dan menengah berkerjasama dengan dengan perguruan tinggi seperti Undip dan Unnes, kemudian dengan Dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, tempat kursus yang memang bergerak khusus dibidangnya, pelaku bisnis, sponsorship, dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang. Kerjasama merupakan solusi untuk mengatasi keterbatasan SDM yang ada namun jika tidak dimanfaatkan dengan baik tentu saja hasilnya tidak akan maksimal. Bidang Perindustrian memang bekerja sama dengan berbagai instansi seperti yang peneliti katakan Bidang ini bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Dinas Kesehatan. Dinas Koperasi dalam hal permodalan dan pendataan melalui IUMK atau Ijin Usaha Mikro Kecil sedangkan Dinas Kesehatan memberikan ijin PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga. Melalui kerjasama tersebut diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan juga akan berdampak kepada angka peningkatan IKM di Kota Semarang. Kerjasama dengan SMK dan tempat kursus bertujuan untuk membantu Bidang Perindustrian dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat misalnya SMK Tata Boga membantu Bidang Perindustrian dalam pembuatan kue-kue tradisonal khas Semarang, nantinya selain menciptakan industri kecil bagi masyarakat namun juga ikut melestarikan makanan khas Kota Semarang.

B. FAKTOR PENDORONG KINERJA BIDANG PERINDUSTRIAN

4.2.1 Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia di Bidang Perindustrian sangat tidak memadai

dan masih sangat kurang, meskipun hal tersebut sebenarnya menjadi hambatan Bidang Perindustrian dalam mencapai kinerja yang maksimal, dengan kata lain jika sumber daya manusia terpenuhi maka kinerja Bidang Perindustrian akan lebih maksimal untuk mencapai target sehingga faktor sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendorong kinerja yang paling dibutuhkan. Sebenarnya masalah mengenai Keterbatasan pegawai bisa diatasi melalui bentuk kerjasama-kerjasama namun peneliti melihat contoh kerjasama yang dilakukan Bidang Perindustrian dengan Dinas Koperasi kurang adanya komunikasi dikarenakan program IUMK yang belum berjalan dengan baik. Keterbatasan SDM tidak akan menjadi hambatan yang utama jika Bidang Perindustrian bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada seperti halnya bekerjasama dengan pemilik modal dari swasta guna mendanai suatu kegiatan tentu bukan hanya keterbatasan SDM yang bisa diselesaikan namun keterbatasan anggaran.

Sumber daya manusia di Bidang Perindustrian dilihat dari segi kualitasnya bisa dilihat dari tingkatan pendidikannya. Hal tersebut sebenarnya tidak menjadi hambatan bagi Bidang perindustrian dalam melaksanakan tugasnya, namun tidak dapat dipungkiri walaupun banyak pegawai yang lulusan S1 namun para pegawai yang sudah berusia tidak muda banyak yang tidak bisa melakukan pengoperasian komputer semahir para pegawai yang lebih muda padahal jaman sekarang ini semua pekerjaan akan lebih mudah dilakukan dengan komputer. Ketika peneliti melakukan magang peneliti melihat memang pegawai yang lebih muda lebih cepat melakukan pekerjaan dibanding pegawai yang sudah lama namun dari segi pengalaman memang jauh berbeda dengan yang masih baru. Jika bisa dikombinasikan dengan baik pengalaman yang dimiliki oleh para pegawai yang sudah lama dengan para pegawai muda yang tentu memiliki pemikiran yang lebih kreatif tentunya

diharapkan bisa menghasilkan kegiatan yang lebih menarik dan cara menyebarkan informasi seputar kegiatan-kegiatan Bidang Perindustrian dengan lebih baik.

4.2.2 Budaya Organisasi

Gambaran orientasi kerja pegawai ada pegawai yang beban kerjanya tidak memenuhi tupoksi dan ada pegawai yang beban kerjanya melebihi tupoksi. Sumber daya manusia memang sudah mengarah kepada peningkatan kerja dengan diadakannya pelatihan baik itu diklat maupun pelatihan lainnya, namun Bidang Perindustrian banyak yang tidak menguasai IT dan mereka bekerja sebagai *team work* tidak mementingkan kepentingan individu maupun kelompok namun mementingkan kepentingan umum. Saat peneliti melakukan magang peneliti banyak melihat banyak pegawai yang datang telat kemudian lebih banyak mengobrol satu sama lainnya ataupun bermain *handphone* hingga jam istirahat menjelang, bukan hanya pegawai Bidang Perindustrian namun juga Bidang lain banyak yang bermalas-malasan dikarena mereka merasa tugas mereka sudah selesai. Ternyata selain mahasiswa para pegawai juga senang melakukan pekerjaan secara *deadline* yaitu jika diminta saja atau mendekati akhir tahun. Dari hal tersebut bisa kelihatan bahwa para pegawai Disperindag Kota Semarang kurang disiplin termasuk Bidang Perindustrian. Padahal kedisiplinan akan menghasilkan hasil yang maksimal karena bukan hanya berhubungan dengan peningkatan kinerja namun juga kualitas dari para pegawainya.

Budaya organisasi dalam hal meningkatkan kinerja memang masih sangat lambat namun sekarang ada sistem dari Pemerintah pusat yang bernama *e-kinerja*. *E-kinerja* atau *electronic kinerja* adalah aplikasi sistem yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang guna mengetahui pekerjaan apa yang dikerjakan oleh para pegawai setiap harinya. Nantinya para pegawai harus

mengupload apa saja yang mereka lakukan setiap harinya sehingga jelas apa saja yang mereka lakukan dan apa saja yang sudah dicapai. Kenyataannya banyak para pegawai yang mengisinya hanya formalitas saja. Masalah absen juga menjadi budaya yang maklum disini dimana para pegawai yang datang terlambat dan pergi ketika jam kerja dengan alasan melakukan survey tanpa adanya surat dinas. Selama kurang lebih 1 (satu) hingga 2 (dua) tahun ini diberlakukan absen dengan *fingerpringting*. melalui *fingerpringting* diharapkan para pegawai tepat waktu karena melalui sistem komputer ini jadi ketahuan siapa saja yang terlambat dan tidak masuk kerja, namun ternyata walaupun bisa mengurangi angka para pegawai yang tidak masuk kerja namun masih ditemukan pegawai yang datang terlambat kemudian pergi lalu datang kembali ketika jam kerja berakhir. Mereka beralasan bahwa Disperindag kebanyakan adalah orang lapangan sehingga mereka jarang dikantor dan suka pergi-pergi namun ketika magang peneliti mendengar banyak alasan ijin diluar urusan pekerjaan dan terlalu sering dilakukan.

Peningkatan kinerja akan selalu dilakukan namun itu semua akan berjalan dengan baik jika bukan saja hanya melalui rencana namun juga aksi nyata dari para pegawainya. Jika ingin adanya peningkatan kinerja untuk semua kegiatan yang mereka lakukan maka harus diiringin dengan sikap profesionalisme dari setiap pegawainya. Inisiatif yang tinggi juga penting walaupun adanya batasan-batasan tupoksi namun dalam hal ini adalah ide-ide kreatif guna dalam memaksimalkan program yang sedang dijalankan. Perubahan pola pikir juga harus diterapkan agar kembali mengingatkan kepada para pegawai bahwa mereka bekerja untuk rakyat dan dibayar oleh rakyat untuk mengabdikan kepada masyarakat sehingga para pegawai akan semakin sadar dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki.

Peneliti menyadari bukan hanya budaya organisasi yang kurang baik di

Disperindag Kota Semarang saja namun beberapa SKPD lainnya sehingga perlu dilakukan peningkatan kembali dan ketegasan oleh Pemerintah Kota sehingga *mindset* masyarakat mengenai para pegawai pemerintah berubah. Selama ini masyarakat banyak yang beranggapan bahwa para pegawai pemerintah banyak yang bermalas-malasan dalam melaksanakan tugasnya disamping itu dengan birokrasi yang sulit yang bukan mempermudah malah mempersulit masyarakat dalam menerima pelayanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka saya selaku peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Bidang Perindustrian Disperindag Kota Semarang pertama-tama diketahui Industri Kecil dan Menengah di Kota Semarang berdasarkan hasil capaian target Renstra tahun 2016-2021 masih sekitar 65,77% dari seharusnya 100% setelah dilakukan penelitian diketahui para terjadinya ketidaktercapainya target dikarenakan pada kenyataan di lapangan memang Bidang Perindustrian ternyata belum bisa melakukan perencanaan dengan baik mengenai program pengembangan IKM. Hal ini terbukti dengan mereka tidak mempunyai data mengenai jumlah IKM di Kota Semarang secara keseluruhan diketahui bahwa mereka memang tidak melakukan pendataan langsung kelapangan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir karena data IKM kota Semarang hanya ada tahun 2007. Kerjasama dengan pihak Dinas Koperasi seputar IKM berupa kegiatan IUMK atau Ijin Usaha Mikro Kecil yang dimana merupakan salah satu program yang bagus untuk membantu masyarakat untuk mendaftarkan IKM-nya melalui Kecamatan nantinya dari program tersebut diharapkan dapat membantu Bidang Perindustrian untuk mengetahui jumlah IKM di Kota

Semarang namun ternyata program tersebut belum banyak membantu dikarenakan pegawai IUMK masih jarang menyetorkan jumlah IKM yang terdaftar secara resmi. Selain kendala dari segi keterbatasan SDM dan anggaran namun juga dari pola pikir masyarakat yang masih takut untuk mengembangkan usahanya sendiri mereka takut gagal dan lebih memilih bekerja di pabrik di bandingkan memiliki usaha sendiri yang tidak pasti. Mereka juga tidak tahu dimana harus menyalurkan pendapat dan masukan-masukan demi memenuhi kebutuhan mereka karena Bidang Perindustrian tidak memiliki pengaduan secara online dan hanya manual dengan langsung datang ke Disperindag.

Bidang Perindustrian sendiripun tidak kembali melakukan monitoring setelah melakukan fasilitas dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan seperti menjahit, membatik dll. Mereka mengatakan untuk menciptakan IKM dibutuhkan waktu minimal 1 (satu) tahun namun kenyataan dilapangan mereka sendiri tidak melakukan monitoring sehingga mereka tidak tahu berapa % (persen) yang dari pembinaan berhasil. Melalui wawancara dengan beberapa para peserta menjahit tahun 2015 peneliti jadi mengetahui keadaan yang sebenarnya walaupun mereka merasa puas dengan pelatihan yang diberikan oleh Bidang Perindustrian. Saat penelitian ini melakukan wawancara kepada para peserta pembinaan pegawai Bidang Perindustrian mengatakan bahwa daerah Kelurahan Ngesrep merupakan salah satu pembinaan yang berhasil namun ketika ditanyakan tidak ada data yang menunjukkan bahwa pembinaan disana berhasil. Dari penelitian ini juga bisa dilihat bahwa SDM memang terbatas namun bukanlah suatu hambatan jika terdapat profesionalisme didalamnya masih berdasarkan posisi dan pengalaman bukan karena kreatifitas dari para pegawainya.

Kenyataannya Bidang Perindustrian tidak memiliki wadah untuk menggali

kebutuhan masyarakat secara online padahal jaman sekarang masyarakat lebih cenderung melihat sosial media dibandingkan dengan baliho, brosur, dll. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui program yang dimiliki Disperindag banyak yang juga tidak tahun Industri Kecil dan Menengah itu seperti apa dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut. Budaya organisasi disana juga masih kurang disiplin dan profesional sehingga berpengaruh kepada pekerjaan yang ada, jika para pegawai masih saja sendiri-sendiri dan tidak bisa memaksimalkan kerjasama maupun anggaran yang mereka miliki dengan perkembangan IKM maka tidak akan mengalami peningkatan dan akan terus stagnan tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat merekomendasikan beberapa hal yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, yaitu: penetapan target dan sasaran lebih ditingkatkan lagi dan perlu memaksimalkan jalinan kerjasama yang sudah dibentuk serta menambah jaringan kerjasama. Melakukan pendataan setiap 2 tahun sekali agar lebih terdata lagi IKM yang belum resmi sehingga terlihat peningkatan atau penambahan jumlah IKM di Kota Semarang. Bidang Perindustrian juga harus memaksimalkan kerjasama yang ada dengan instansi lainnya dengan menjalin komunikasi yang baik agar kegiatan kerjasama yang dibangun dapat lebih menguntungkan satu sama lainnya.

Perlu dilakukannya monitoring setelah dilakukannya pembinaan dan fasilitasi agar selain data IKM terpenuhi juga Bidang Perindustrian mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat. Menciptakan sosial media secara resmi mengenai IKM agar masyarakat lebih tahu program-program

yang dimiliki oleh Bidang Perindustrian seputar IKM, selain itu masyarakat jadi bisa menyalurkan masukan-masukan dan keluhan tanpa harus datang langsung ke Disperindag Kota Semarang cara tersebut tentu lebih efektif dan efisien dari segi anggaran.

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting namun seiring berjalannya waktu perlu menambah softskill yang dimiliki melalui pelatihan-pelatihan berbasis IT dan menggunakan metode kerja yang lebih menyenangkan agar para pegawai lebih merasa nyaman untuk bekerja. Sistem reward and punishment juga sangat baik jika diberlakukan, nantinya setiap bulan Bidang yang memiliki hasil kinerja yang paling membanggakan akan mendapatkan hadiah atau pernyataan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang pada saat upacara ataupun dengan menempelkan foto Bidang di Kantor nantinya akan menimbulkan kebanggaan sendiri guna meningkatkan kinerja tiap bidang. *Punishment* sendiri bisa dengan melakukan pemotongan gaji atau Bidang yang paling banyak melakukan kesalahan akan diumumkan saat upacara di Balaikota sehingga menimbulkan rasa malu dan ingin memperbaiki kinerja dari Bidang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Keban, Yermias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu Edisi 1. Yogyakarta: Gavamedia
- Moleong.2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Thoha, Miftah.2010. Ilmu Administrasi Kontemporer. Jakarta : Kencana

Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dokumen Pemerintah :

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Tahun 2016-2021

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016

Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sumber Website :

www.semarangkota.go.id

<https://semarangkota.bps.go.id>